



JOMIK
(Jurnal Online Mahasiswa Ilmu Komunikasi)
FISIP - Universitas Jenderal Soedirman
 Journal homepage: <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jomik/>



Strategi Batik TV dalam Berperan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Kota Pekalongan

Riska Ayu Kartika W., Edi Santoso, Petrus Imam Prawotojati

Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman.

Email: riska.wijayanti@mhs.unsoed.ac.id

Publikasi

Vol. 02, No. 02
Desember 2022

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana strategi yang dilakukan oleh LPPL Batik TV sebagai satu-satunya televisi publik lokal di Kota Pekalongan, khususnya dalam strategi pembuatan program acara dan strategi penyiarannya. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan triangulasi sumber data sebagai validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses kegiatannya sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, Batik TV belum sepenuhnya menerapkan aspek independensi dikarenakan posisi Batik TV yang masih dibawah pemerintah Kota Pekalongan dengan beberapa jabatan strategis yang ada di Batik TV diisi oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu partisipasi publik dilakukan melalui beberapa program acara yang bertujuan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan, strategi program acara yang dilakukan oleh LPPL Batik TV yaitu dengan menguatkan konten yang bernuansa budaya lokal. Strategi penyiaran yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan media sosial selain kanal UHF untuk penyebaran program acara agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan menempatkan program berita yang merupakan program dengan rating tinggi pada waktu prime time. Dalam menjalankan perannya juga, LPPL Batik TV memiliki beberapa kendala seperti kekurangan jumlah sumber daya manusia, keuangan, kreativitas dan minimnya peralatan produksi yang dimiliki.

Abstract

The purpose of this study is to explain how the strategy carried out by LPPL Batik TV as the only local public television in Pekalongan City, especially in the strategy of making programs and broadcasting strategies. The method used is qualitative research with data collection techniques of observation, in-depth interviews and documents. The selection of informants was carried out using purposive sampling technique and triangulation of data sources as data validity.

The results show that in the process of its activities as a public broadcasting institution, Batik TV has not fully implemented the independence aspect due to the position of Batik TV which is still under the Pekalongan City government with several strategic positions in Batik TV filled by employees of the Communication and Information Office. In addition, public participation is carried out

Kata kunci:

Media Lokal;
Produksi media
Televisi;

Keyword:

Local Media;
Media production
Television;

through several programs that aim to channel people's aspirations to the Pekalongan City government. Meanwhile, the program strategy carried out by LPPL Batik TV is to strengthen content with local cultural nuances. The broadcasting strategy was carried out by using social media other than the UHF channel to distribute programs to make it more accessible to the public and placing news programs which were programs with high ratings during prime time. In carrying out its role as well, LPPL Batik TV has several obstacles such as a lack of human resources, finance, creativity and the lack of production equipment owned.

1. Latar Belakang

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 dan UU No. 32 Tahun 2002, khususnya pada pasal 2,3 dan 4 dalam PP. Definisi LPP menurut peraturan perundang-undangan ialah lembaga penyiaran berupa tubuh hukum serta didirikan oleh negeri, bertabiat independen, netral, tidak komersial, serta berperan membagikan layanan bagi kepentingan warga. Sedangkan menurut Ghazali (2002) lembaga penyiaran publik ialah lembaga penyiaran yang memiliki visi dalam memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas hidup suatu bangsa, dan hubungan antarbangsa, dan memiliki misi sebagai sarana diskusi, artikulasi dan pelayanan kebutuhan publik. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berorientasi penuh pada kebutuhan warga dengan metode memperlakukan publik yang dilindungi haknya dalam mendapatkan suatu data, bukan cuma selaku objek industri media penyiaran semata (Yantos, 2016). Oleh karena itu, peran publik sebagai khalayak dan partisipan yang aktif harus diperhatikan, karena lembaga penyiaran publik tidak sama dengan lembaga penyiaran pemerintah, serta tidak juga sebagai lembaga penyiaran yang berorientasi kepada pasar (Irawan, 2010).

Tidak hanya bertugas menyiarkan data, pembelajaran, budaya, serta hiburan, Lembaga Penyiaran Publik memiliki 4 prinsip. Awal, siarannya wajib menjangkau segala daerah di Indonesia. Kedua, siarannya wajib menggambarkan keanekaragaman yang merefleksikan struktur keragaman, kenyataan sosial, ekonomi, serta budaya warga. Ketiga, program siarannya wajib mencerminkan bukti diri budaya nasional. Keempat, penyajian siarannya sebaiknya bermacam-macam.

Terdapat berbagai LPP di Indonesia, yaitu RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL). RRI merupakan satu-satunya radio dan TVRI merupakan satu-satunya televisi yang menyanggah nama negara dan siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara, menurut Masduki (2015). RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan kontrol sosial.

Perkembangan televisi bukan hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga terjadi di tingkat provinsi/lokal. Salah satunya, Kota Pekalongan terdapat salah satu lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, yaitu LPPL Batik TV. Untuk menjaga eksistensi Batik TV, pemerintah daerah mengangkat kembali budaya lokal yang dikemas menarik untuk ditayangkan melalui program-program Batik TV. Dari pengamatan peneliti, Batik TV merupakan satu-satunya televisi lokal yang ada di Kota Pekalongan. Sebagai satu-satunya media televisi lokal daerah, Batik TV memiliki tantangan dalam hal menjaga lokalitas dan budaya yang ada di Kota Pekalongan melalui tayangan program-program acara yang mereka sajikan kepada masyarakat.

Dalam menganalisis media, terdapat pisau analisis yakni teori normatif media. Teori ini muncul pada era *yellow journalism*, dimana banyak pelaku media massa yang tidak peduli pada akurasi, objektivitas dan sensitivitas publik. Menilik pada kejadian tersebut, pelaku media mencoba kembali untuk memperbaiki image yang sebelumnya buruk menjadi lebih profesional pada awal abad 20. Hal itu yang mendasari lahirnya teori tanggung jawab sosial, yakni sebuah teori normatif yang mengambil alih tanggung jawab industri dan publik dari kebebasan penuh media dengan pengawasan secara eksternal (McQuail, 2012). Kendati demikian penelitian ini ingin memaparkan strategi seperti apa yang dilakukan Batik TV sebagai wujud tanggung jawab sosial Batik TV dalam menjadi LPPL.

Tanggung jawab sebuah lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yakni menginformasikan kepentingan publik. Berbagai program dan informasi erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perihal informasi yang disampaikan juga berimbang, bahkan berpihak kepada masyarakat. LPPL juga bersifat

lokal jadi informasi yang disampaikan lebih banyak tentang lokal bukan nasional, atau cenderung menyajikan kearifan dan budaya lokal.

Peneliti tertarik untuk meneliti salah satu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) milik daerah Kota Pekalongan yakni Batik TV. Pemilihan Batik TV sebagai objek penelitian karena Batik TV merupakan satu-satunya LPPL berbentuk televisi dibawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yang hingga saat ini masih eksis mengudara. Dalam operasionalnya Batik TV didanai oleh dana publik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tentu dengan hal tersebut memiliki keterbatasan pada Batik TV dalam menjalankan kelembagaan dan operasionalnya. Sebagai LPPL, Batik TV menayangkan berbagai jenis program yang memiliki fungsi utama dalam hal meng edukasi dan menyampaikan informasi kepada publik. Komersial bukan menjadi tujuan utama dalam pengoperasionalan sebuah Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Program demi program disusun agar dapat dinikmati oleh khalayak. Dalam sehari LPPL Batik TV mampu menyiarkan program-program menarik untuk khalayak di berbagai bidang, seperti edukatif, budaya, religi, wisata dan kuliner di sekitar Kota Pekalongan. Sebagai lembaga penyiaran publik, dalam setiap programnya Batik TV dituntut untuk selalu melibatkan peran publik dalam operasionalnya dan diharuskan mendedikasikan setiap program tersebut untuk kepentingan publik. Upaya ini dilakukan karena pada dasarnya publik memiliki peran yang cukup vital dalam stasiun penyiaran berbentuk lembaga penyiaran publik. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dituntut untuk melayani kepentingan publik dengan memenuhi kebutuhan akan informasi yang penting bagi masyarakat dan warganya, yang mana ditetapkan dan dinilai dengan cara sistem politik demokratis. (McQuail, 2012).

Batik TV tentu memiliki strategi untuk menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, yang pastinya memenuhi kebutuhan publik terkait dengan memperoleh informasi yang baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Batik TV sebagai objek penelitian. Peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi Batik TV menjalankan perannya sebagai LPPL di daerah dalam hal memberikan informasi kepada masyarakat melalui program-program acara yang Batik TV miliki. Dalam meneliti, peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2010) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yang dipilih dengan beberapa kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti yaitu jajaran direktur LPPL Batik TV dan staff dari LPPL Batik TV. Penelitian ini berlokasi di LPPL Batik TV yang beralamat di Jalan Jetayu Kota, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Sedangkan, pada metode analisis data karena penelitian ini menggunakan model kualitatif, terdapat tiga komponen utama, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles&Huberman, 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan selama tiga minggu, mulai dari tanggal 10 Maret-3 April 2021. Selama tiga minggu melakukan penelitian di Batik TV, selain melakukan wawancara dengan beberapa informan pada hari-hari tertentu, peneliti juga ikut melakukan observasi pada pembuatan berita, mulai dari ikut melakukan liputan dengan beberapa jurnalis Batik TV yang sudah mengenal secara personal, mengamati proses penyeleksian berita sampai berita yang telah ditulis dapat naik tayang di program berita Bedah. Peneliti melakukan proses wawancara dengan tujuh informan yang dipilih dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Informan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama yang dipilih yaitu Kusuma Adi Achmad selaku Direktur Umum, Nikita Rosidin selaku Direktur Operasional Rizka Singgih Permana selaku Koordinator Bidang Non News Feature dan Teguh Santoso selaku Koordinator Bidang News. Sedangkan, informan pendukung yaitu, Alan Qoshdana selaku Social Media Admin, Irfa Febriani selaku Jurnalis dan Titik Untari selaku staff Marketing. Dalam melakukan penelitian, peneliti tidak banyak menemukan kendala karena pihak Batik TV sangat kooperatif kepada peneliti, baik itu saat melakukan wawancara, meminta dokumen-dokumen pendukung serta saat peneliti mengikuti proses produksi program berita. Namun, terdapat kendala yang disebabkan oleh faktor cuaca yaitu banjir yang beberapa hari menggenang pada beberapa daerah di Kota Pekalongan yang

menghambat peneliti dalam perjalanan menuju kantor Batik TV sehingga berpengaruh pada waktu penelitian sedikit mundur dari jadwal yang telah direncanakan

3.1. Batik TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 3, lembaga penyiaran publik lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang dalam siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) bagi radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) bagi televisi. Berdasarkan hasil penelitian, Batik TV yang melabelkan dirinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal memang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan yang dalam operasionalnya dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo).

Dalam mewujudkan fungsi dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, sebuah lembaga penyiaran publik dituntut untuk menerapkan empat prinsip seperti menurut Effendi Ghazali (2002:113). Pertama, *Akses Publik*: Batik TV menggunakan frekuensi radio 57 UHF dalam menayangkan program acara mereka, selain itu penggunaan media sosial seperti IG, Facebook, Twitter dan Youtube untuk menyebarkan program acaranya dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses Batik TV. Kedua, *Dana Publik*: Dana operasional LPPL Batik TV selama ini berasal dari dana publik yang dikelola oleh pemerintah melalui APBD Kota Pekalongan dan iklan. Ketiga, *Akuntabilitas Publik*: pelaporan akan pengelolaan dana yang ada di Batik TV diupload dalam website Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) yang masih menjadi satu dengan laporan keuangan tahunan milik Dinkominfo dan bisa diakses oleh masyarakat secara bebas melalui website PPID. Keempat, *Partisipasi Publik*: keterlibatan publik dalam Batik TV melalui beberapa program acara yang dikhususkan sebagai ruang bagi publik seperti Ngalor Ngidul Pekalongan, Teras Walikota dan Ngaji Bareng Walikota.

Merujuk dari definisi LPP menurut PP No.11 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa sebuah LPP harus menerapkan independensi dalam segi operasional dan organisasionalnya. Independensi sangat penting dalam sebuah lembaga penyiaran publik dikarenakan sebuah stasiun publik yang independen dapat memberikan akses pada masyarakat untuk menjadi lebih aktif dalam arena kehidupan publik yang lain, yang mana tidak didapatkan atau tidak dapat dilakukan dalam media penyiaran komersial (Croteau & Hoynes, 2001). Dari hasil temuan peneliti, LPPL Batik TV belum sepenuhnya menerapkan aspek tersebut, baik dalam sistem organisasional dan pendanaannya. Dalam aspek organisasional, sebuah lembaga penyiaran publik yang merupakan lembaga negara seharusnya menerapkan *self regulation* atau dalam arti lain dalam kepengurusan dan pengaturan internal sebuah lembaga penyiaran perannya diserahkan kepada pers itu sendiri (Thomlinson dan Chambers, 2014; Fielden, 2012) dalam Rianto (2019). Pada struktur organisasi milik LPPL Batik TV masih melibatkan beberapa pegawai negeri sipil yang berasal dari Dinkominfo yang merupakan pihak dari Pemerintah Daerah. Beberapa posisi strategis seperti dewan pengawas, direktur utama dan direktur umum merupakan pegawai dari Dinkominfo. Hal ini menunjukkan masih adanya campur tangan dari pihak pemerintah terkait dengan susunan organisasi yang ada di LPPL Batik TV. Mengacu pada teori tanggung jawab sosial, sebuah media harus bebas, dan mengatur dirinya sendiri. Namun, dalam konteks LPPL Batik TV, proposisi utama dalam teori tanggung jawab sosial belum dapat sepenuhnya diterapkan oleh LPPL Batik TV. Kedua, dalam aspek pendanaan, sebuah lembaga penyiaran publik mendapatkan pendanaan operasionalnya melalui APBN/APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, iuran penyiaran dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran (UU No.32 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1). Sebagian besar pendanaan yang didapatkan oleh LPPL Batik TV berasal dari APBD dan siaran iklan yang dibatasi 10-15% dari keseluruhan durasi program acara. Dengan dominannya porsi pendapatan di luar dana lisensi baik itu dari pemerintah sebagai pemberi bantuan maupun dari iklan atau kerjasama membuat munculnya kekhawatiran akan independensi dan kenetralan sebuah penyiaran publik terutama dalam memberitakan persoalan strategis yang ada kaitannya dengan publik (Wulandari, 2016).

Dengan posisi LPPL Batik TV yang masih menjadi bagian dari Dinkominfo Kota Pekalongan, dalam segi anggaran, pelaporan keuangan tahunan LPPL Batik TV masih menjadi satu dengan Dinkominfo Kota Pekalongan yang mana akan diunggah kedalam website Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) namun dengan nama dibawah Dinkominfo. Sehingga, sistem pendanaan di LPPL Batik TV dapat dikatakan belum sepenuhnya independen karena pelaporan keuangannya masih menjadi bagian dengan Dinkominfo Kota Pekalongan. Sistem pendanaan sebuah lembaga penyiaran publik harus dibuat benar-benar independen, tanpa campur tangan dari pihak eksternal diluar lembaga penyiaran publik tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Wulandari (2016) bahwa bantuan operasional dan finansial yang berasal dari pihak ketiga, baik dari pemerintah maupun pihak yang memberikan songkongan dana bagi TVRI membuat TVRI sebagai lembaga penyiaran publik terseret dalam praktek ekonomi politik media yang jika dikaitkan dengan sumber pendanaan LPPL Batik TV juga

mengalami hal yang sama. Hal ini menyebabkan adanya intervensi yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak pemberi sponsor dalam kebijakan redaksional baik itu pada TVRI maupun LPPL Batik TV. Kondisi seperti ini membuat sebuah lembaga penyiaran publik menjadi dilematis dan tidak ada pilihan lain untuk tetap bisa bertahan menjaga eksistensinya dalam penyiaran yang konsekuensinya harus mengakomodir beberapa kepentingan dari pemerintah ataupun pihak sponsor. Meskipun pada akhirnya hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan tidak komersial seperti yang tercantum dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

Selanjutnya, lembaga penyiaran publik berbeda dengan lembaga penyiaran pemerintah (Irawan:2010:112). Effendi Ghazali (2002:2) menyebut bahwa lembaga penyiaran publik ialah lembaga penyiaran yang memiliki visi dalam memperbaiki kualitas kehidupan publik, kualitas hidup suatu bangsa, dan hubungan antarbangsa, dan memiliki misi sebagai sarana diskusi, artikulasi dan pelayanan kebutuhan publik. Atau dalam arti lain menaruh publik sebagai komoditi utama (partisipasi aktif) alih-alih menjadi objek komersial. Dalam temuan peneliti, Batik TV yang berwujud lembaga penyiaran publik namun masih berada dibawah kontrol Pemerintah Daerah yang mana menjadi inisiasi awal dibentuknya LPPL Batik TV pada tahun 2012. Menurut Harmes Tahir (dalam Adhrianti, 2008) sebuah televisi publik mengacu pada sistem benefolent, yang memiliki arti merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk oleh publik, dimiliki dan dikontrol oleh publik. Namun, dalam prakteknya LPPL Batik TV yang menamakan dirinya sebagai televisi publik masih belum sepenuhnya melaksanakan sistem benefolent. Televisi publik yang jika mengacu pada sistem benefolent seharusnya dibentuk oleh publik, pembentukan LPPL Batik TV malah sepenuhnya merupakan inisiasi awal dari Pemerintah Kota Pekalongan yang pada tahun 2011 saat dijabat oleh Walikota H.N Basyir Ahmad.

Dengan inisiator dan pendiri LPPL Batik TV berasal dari Pemerintah Kota Pekalongan, membuat peran publik dalam pembentukan LPPL Batik TV tidak ada. Begitu pula dengan dimiliki dan dikontrol oleh publik yang mengacu pada sistem benefolent, sesuai dengan temuan yang ditemukan oleh peneliti terdapat kontrol dari pemerintah pada LPPL Batik TV, khususnya dalam arah pemberitaan dan porsi pemberitaan. Sebuah media televisi jika mengacu pada teori tanggung jawab sosial (kepentingan publik) seharusnya membatasi campur tangan pemerintah terhadap kinerja suatu media. Pemerintah dapat melakukan intervensi pada suatu media namun dengan menerapkan batasan-batasan tertentu (ada porsi tersendiri). Namun dalam prakteknya, LPPL Batik TV sebagai televisi publik masih mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah karena statusnya yang masih berada dibawah pemerintah daerah. Banerje dan Seneviratne (dalam Wulandari, 2016) mendefinisikan TV pemerintah sebagai sistem penyiaran yang dikendalikan oleh pemerintah dan sistem penyiaran nya yang melayani fungsi pelayanan publik tertentu. TV pemerintah pada dasarnya dikendalikan oleh pemerintah, memiliki model pembiayaan yang mirip dengan penyiaran publik yang juga berasal dari pemerintah. Hal yang membedakan dengan televisi publik yaitu TV pemerintah memiliki sedikit aspek independensi dan kenetralan dalam pembuatan program dan pengelolaan manajemennya. LPPL Batik TV yang menyebut dirinya sebagai lembaga penyiaran publik. jika mengacu pada definisi sistem penyiaran pemerintah, menjadikan LPPL Batik TV lebih merujuk pada definisi TV pemerintah.

Menurut Putra (2006) dalam TV pemerintah isi siaran lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan publik, program-program pemerintah lebih mendominasi isi informasi yang disampaikan. Dari hasil temuan peneliti, perbandingan pemberitaan terkait dengan agenda pemerintah Kota Pekalongan dengan informasi yang sifatnya umum, memiliki perbandingan 60:40% dengan porsi pemberitaan terkait dengan agenda dan program Pemerintah Kota Pekalongan yang lebih mendominasi siaran dalam program acara Berita Daerah (Bedah). Seharusnya, sebagai televisi publik informasi yang diberitakan harus mementingkan kepentingan publik diatas kepentingan penguasa (state) (Effendy,2014). Namun, dalam prakteknya, LPPL Batik TV malah memberikan porsi lebih besar kepada pemerintah daerah.

Sebagaimana lazimnya, penyiaran publik yang pada awalnya lahir atas dasar inisiatif dari publik. dan berangkat dari kebutuhan-kebutuhan terkait publik atau komunitas, yang sesuai dengan konsep ideal ruang publik (Adhrianti: 2008). Batik TV yang melabelkan dirinya sebagai lembaga penyiaran publik harusnya dapat mawadahi kebutuhan akan ruang publik yang tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah. Pada konsep ruang publik, independensi dan netralitas bisa menjadi acuan, karena pada dasarnya fungsi sebuah media dapat memfasilitasi terbentuknya opini yang menjadi wadah untuk perdebatan publik-dimana media seharusnya tidak terkontrol oleh negara maupun pasar (Adhrianti, 2008). Namun, pada temuan peneliti, arah pemberitaan yang ada pada LPPL Batik TV lebih merujuk pada informasi yang bersifat top-down, yang artinya pemerintah memiliki porsi lebih dalam melakukan penyebaran informasi melalui LPPL Batik TV kepada masyarakat. . Dalam temuan peneliti, LPPL Batik

TV memang sudah melakukan perannya sebagai jembatan antara publik dengan pemerintah dengan melibatkan publik dalam beberapa program acara yang dibuat oleh LPPL Batik TV. Beberapa program yang mempertemukan publik dan pemerintah menjadi salah satu peran LPPL Batik TV dalam menciptakan ruang publik bagi masyarakat setempat:

3.2. Partisipasi Publik dalam Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Batik TV

Lembaga penyiaran publik memberikan pengakuan secara penuh terhadap peran dan evaluasi oleh publik dalam posisinya sebagai khalayak dan partisipan aktif (Irawan, 2010). Keterlibatan publik dalam pengelolaan media, menurut Manuela Grunangerl et al (2012) dalam Effendy (2014) terbagi menjadi tiga dimensi yakni akses, interaksi dan partisipasi. Akses berhubungan dengan kemudahan publik untuk memperoleh berbagai program acaranya setiap waktu dan tempat melalui berbagai macam saluran dan keterbukaan proses organisasi media. Sedangkan, interaksi berkaitan dengan langkah untuk membangun hubungan antara pelaku media profesional dengan publik dengan mengikutsertakan mereka dalam konsumsi media dan proses produksi, meskipun terkadang lebih berpihak pada kepentingan pelaku media. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sebuah dialog dengan publik untuk menumbuhkan umpan balik. Terakhir, partisipasi merujuk pada proses pengambilan keputusan terkait pada level organisasi dan produksi media antara publik dengan pelaku media.

LPPL Batik TV melibatkan partisipasi publik dalam beberapa program acara yang dibuat dengan inisiasi antara LPPL Batik TV dengan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada pemerintahan Walikota HM Saelany Machfudz periode 2017-2020, terdapat dua program yang melibatkan publik dalam produksi program acaranya, yaitu Ngaji Bareng Walikota dan Teras Walikota. Hal ini selaras dengan visi yang dijunjung oleh LPPL Batik TV yaitu "Mewujudkan media transparansi informasi dan partisipasi publik" yang mana LPPL Batik TV berusaha menjadi media yang melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Menurut Effendi Ghazali (2002), lembaga penyiaran publik memiliki misi untuk menjadi forum diskusi, artikulasi dan, pelayanan kebutuhan publik. Forum diskusi publik ini sejalan dengan konsep ruang publik (public sphere) yang muncul pada pemikiran Habermas (dalam Aries, 2017) tentang harapan akan suatu kondisi dimana terjadi komunikasi yang bebas dari dominasi, di dalam masyarakat. Dalam ruang publik, kebebasan berbicara, berpartisipasi, berkumpul dalam debat politik dan mengkritik proses pengambilan keputusan publik sangat dijunjung tinggi (Effendy, 2014) LPPL Batik TV melalui kedua program acara tersebut memberikan ruang publik (public sphere) bagi masyarakat yang menjadi audiens dalam program untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya dan bebas mengkritisi pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan program-program yang dijalankan secara langsung,. Ruang publik menurut Idi S. Ibrahim (dalam Effendy, 2014) merupakan penengah yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Dalam temuan penelitian, sesuai dengan konsep yang diutarakan oleh Idi S. Ibrahim, LPPL Batik TV melalui program Ngaji Bareng Walikota dan Teras Walikota membuat kedua program tersebut menjadi ruang publik yang menjembatani antara pemerintah Kota Pekalongan dengan masyarakat yang menjadi audiens. Publik sebagai audiens diberikan kesempatan dalam acara tersebut untuk berbicara dalam hal mengkritisi suatu kebijakan yang dibuat pemerintah dan menyampaikan pendapatnya kepada Walikota secara langsung. Pada konsep penyiaran, masyarakat dapat secara interaktif memberikan masukan, saran, harapan dan kritikan pada pemerintah daerah sehingga keberadaan televisi pemerintah daerah bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya. (Yantos, 2015). Keberadaan LPPL Batik TV sebagai sarana penghubung antara pemerintah dan publik telah dilakukan oleh LPPL Batik TV melalui program acara Teras Walikota dan Ngaji Bareng Walikota yang sifatnya merupakan program acara interaktif.

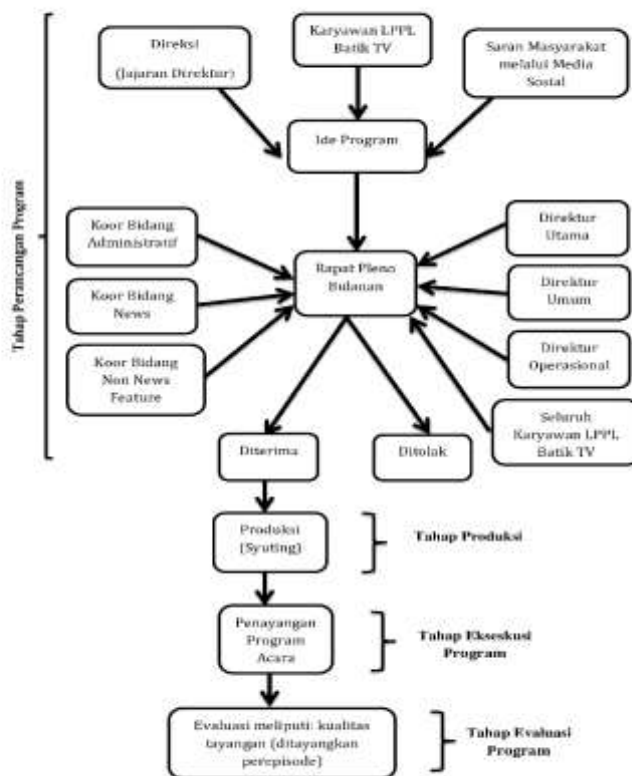
3.3. Analisis Strategi Batik TV dalam Berperan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)

(1) Strategi Program Acara

Menurut Yantos (2015), program ialah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisi rangkaian program acara yang khusus ditujukan pada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi (UHF). Dalam menyajikan suatu program acara yang dibutuhkan suatu strategi khusus yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran. Tujuan pembuatan suatu program acara dibutuhkan sebagai alat ukur dari keberhasilan program tersebut. Tujuan program televisi swasta dan televisi publik pastilah berbeda. Televisi swasta lebih menonjolkan tayangan-tayangan program acara yang dapat menghasilkan rating tinggi sehingga dapat menarik iklan sebanyak-banyaknya, atau dalam arti lain disebut sebagai praktek komersialisasi (Wulandari, 2016). Sedangkan televisi publik dituntut untuk memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa dikancah internasional (Hadiyat, 2015). Dalam arti lain, televisi publik dituntut untuk memberikan tayangan yang sifatnya meng edukasi bagi masyarakat. Dengan kedua tujuan penayangan program yang berbeda, pastilah bentuk tayangan program acara yang dibuat oleh stasiun televisi swasta dan stasiun televisi publik berbeda jika melihat target khalayaknya. Televisi publik melihat khalayak sebagai warga

negara yang harus dipenuhi dalam akses mendapatkan informasi yang baik dan benar, sedangkan televisi swasta memandang khalayak dalam sudut pandang komersial.

Selanjutnya, dalam membuat program-program acara yang diperuntukan untuk publik, Lembaga Penyiaran Publik (LPPL) Batik TV memerlukan sebuah strategi dalam penyusunan program-program acara yang akan disiarkannya. Strategi program televisi menurut Morissan terdiri dari perencanaan program, eksekusi program, dan pengawasan dan evaluasi program



Gambar 1. Perencanaan Program Acara
Sumber: Hasil Analisis Peneliti

(1.1) Memuat Konten Lokalitas

Menurut Yantos (2015), Televisi lokal memiliki posisi sebagai media daerah, memuat konten dan mengemas konten tersebut dengan mengedepankan aspek kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari topik yang dibawa ataupun bahasa yang digunakan. LPPL Batik TV menerapkan hal tersebut dalam beberapa program acara yang ditayangkan misalnya program Kalongan Bae yang merupakan program berita namun dibawakan dengan menggunakan bahasa Jawa Pekalongan-an. Aspek lokalitas dimunculkan dengan melakukan proses produksi program di daerah sekitar Pekalongan. Misalnya saja, program kuliner (Icip-Icip) produksinya menyasar tempat-tempat makan yang ada di wilayah Kota Pekalongan atau program acara musik (Musiklopedia) yang menampilkan acara-acara musik baik daerah maupun nasional dan mengajak band-band lokal Kota Pekalongan untuk melakukan produksi.

(1.2) Pelayanan terhadap Masyarakat

Mengacu dalam PP No.11 Tahun 2005 Ayat 1 Pasal, lembaga penyiaran publik berfungsi dalam memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, LPPL Batik TV membuka akses peliputan gratis kepada masyarakat, terkait dengan acara apa yang sedang/akan diadakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh LPPL Batik TV dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Masyarakat atau komunitas yang memiliki suatu acara dapat menghubungi pihak LPPL Batik TV untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan mereka secara gratis. Masyarakat yang ingin kegiatannya di liput hanya perlu memberikan surat atau proposal kegiatan kepada LPPL Batik TV. Acara peliputan kegiatan ini kemudian akan masuk dalam segmen program Berita Daerah (Bedah) jika kegiatan tersebut bersifat singkat atau sifatnya universal. Namun, bila kegiatan yang diadakan oleh masyarakat memiliki nilai tersendiri misal kegiatan yang sifatnya keagamaan akan masuk dalam program acara khusus yang memuat tentang keagamaan

(2) Strategi Penyiaran

Definisi Penyiaran berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Pasal 1 ialah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima. Sedangkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Pasal 4, penyiaran televisi ialah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Kunci keberhasilan suatu lembaga penyiaran bergantung pada kualitas para pekerja pada tiga bidang vital dalam industri penyiaran, yaitu teknik, program, dan pemasaran (Morissan,2008). Dalam temuan peneliti, LPPL Batik TV dalam perekrutan pekerja yang nantinya bekerja dalam bidang vital, teknik dan program memang memilih calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dalam bidang pertelevisian, tidak sembarangan memilih calon pekerja yang tidak memiliki skill dalam dunia broadcasting. Dengan pekerja yang telah memiliki skill dalam bidang broadcasting memiliki tujuan untuk menghadirkan program-program acara yang menarik dan disampaikan kepada masyarakat.

Strategi menurut Effendi (2012) strategi yaitu sebuah rencana yang cermat mengenai suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau target khusus. Dalam melakukan penyiaran, LPPL Batik TV menggunakan frekuensi 57 UHF untuk menyiarkan program-program acaranya kepada masyarakat. Target khalayak (audiens) berpengaruh pada format program siaran, banyak riset dilakukan dengan tujuan menentukan jenis-jenis program penyiaran yang menarik dengan klasifikasi khalayak yang berbeda (Morissan, 2008). Dari hasil temuan peneliti, berbagai program acara yang disiarkan melalui 57 UHF diperuntukan untuk semua usia, tidak ada segmentasi khalayak berdasarkan usia yang dilakukan oleh LPPL Batik TV untuk keseluruhan program-program acara yang mereka siarkan. Namun, meskipun tidak adanya segmentasi khusus, LPPL Batik TV tetap menghadirkan program-program acara yang terbagi menjadi beberapa tema, seperti siaran pendidikan yang diperuntukan untuk siswa sekolah diletakkan pada jam-jam siswa melakukan pembelajaran online saat pagi hari yaitu pukul 08.00-11.00 WIB. Sedangkan untuk program-program acara yang menjadi unggulan milik LPPL Batik TV disiarkan pada waktu prime time. Istilah prime time merupakan waktu pada saat stasiun penyiaran memiliki jumlah penonton paling banyak (Ginting, 2015:20). Rata-rata waktu prime time di seluruh dunia berkisar pada waktu 18.00-22.00. Sedangkan di LPPL Batik TV waktu prime time nya pada pukul 18.00-20.00 yang mana pada waktu tersebut LPPL Batik TV menyiarkan program berita Bedah Malam yang menjadi program unggulan. Penayangan program berita Bedah pada waktu dimana memiliki jumlah penonton terbanyak membuat masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkannya.

Mengacu pada Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia No.45 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan, dan Pemilihan Umum menyebut bahwa kepentingan publik ialah kepentingan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat diluar kepentingan pribadi atau kelompoknya dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai ranah publik di bidang penyiaran. Tayangan program berita Bedah yang berisi informasi yang terjadi di sekitar Kota Pekalongan diperuntukan untuk kepentingan khalayak umum (masyarakat), khususnya bagi pemenuhan kebutuhan akan informasi kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam usaha memberikan akses informasi yang luas kepada publik, LPPL Batik TV menggunakan platform media sosial, baik itu Instagram, Youtube, Facebook dan Twitter yang jangkauan penerima informasinya lebih luas dibandingkan dengan frekuensi UHF yang hanya mencakup Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pemanfaatan fitur-fitur yang dimiliki oleh media sosial berdampak positif khususnya dalam keberagaman gaya konten dan informasi yang disampaikan secara real time, menjangkau khalayak yang lebih luas yang jika menggunakan platform frekuensi radio (konvensional) terhambat oleh waktu, ruang dan uang (Kompasiana, 2017). Penyebaran informasi melalui media sosial yaitu dapat diakses dimanapun dan kapanpun menjadi kelebihan bagi masyarakat yang ingin mengakses siaran LPPL Batik TV namun terhambat oleh tempat tinggalnya tidak dapat menangkap frekuensi 57 UHF milik LPPL Batik TV.

3.4 Hambatan yang dialami Batik TV dalam Berperan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPPL)

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) di Kota Pekalongan, LPPL Batik TV mengalami hambatan (kendala) khususnya dalam aspek sumber daya manusia, keuangan, kreativitas dan peralatan produksi. Hambatan yang dialami saling berkaitan satu sama lain.

Kendala pertama yaitu minimnya kuantitas SDM yang dimiliki sehingga membuat beberapa pekerja yang merangkap dua hingga tiga bidang pekerjaan yang berbeda. Solusinya untuk menanggulangi hal ini dilakukan dengan menerima beberapa pekerja freelance di LPPL Batik TV maupun anak magang. Selain itu, solusi pribadi dalam mengatasi beberapa pekerja yang dibebankan lebih dari satu jenis pekerjaan lebih kepada pengaturan waktu (time managing) yang benar-benar harus bisa diatur oleh pribadi karyawan tersebut.

Kedua, yaitu aspek Keuangan. Dengan sumber pendanaan utama yang berasal dari APBD tidak sepenuhnya dapat meng-cover kebutuhan biaya produksi. Alokasi dana APBD yang didapatkan oleh LPPL Batik TV tidak semuanya dapat digunakan untuk pendanaan produksi program, namun juga untuk biaya gaji karyawan dan sebagainya. Sehingga menyebabkan beberapa program acara harus diproduksi dengan menekan budget produksi seminim mungkin, dari temuan peneliti, beberapa program acara yang dibuat oleh LPPL Batik TV tidak ada biaya produksinya alias 0 rupiah, bahkan biaya yang harusnya diberikan kepada narasumber yang datang tidak ada. Namun, ada pula program acara yang menggunakan biaya produksi, namun alokasi nya hanya untuk membeli kebutuhan pendukung syuting dan transportasi. Staff produksi dituntut untuk bisa membuat suatu program acara dengan biaya produksi yang minim.

Ketiga, Kreativitas yang berhubungan dengan kendala keuangan. Untuk menciptakan suatu program yang bagus dan menarik dibutuhkan biaya produksi yang tidak sedikit, dengan keuangan yang terbatas, tim produksi dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan budget. Selain itu, kendala dalam aspek kreativitas lainnya terletak pada sulitnya mencari narasumber yang berbeda setiap episodenya pada suatu program acara jika hanya mencarinya di sekitar Kota Pekalongan. Solusi yang dilakukan oleh tim produksi yaitu dengan melakukan produksi diluar Kota Pekalongan yang memungkinkan bisa mendapatkan narasumber yang berbeda dan lebih banyak pilihannya, seperti di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Tegal.

Kendala keempat yaitu Keterbatasan peralatan pendukung produksi, seperti kamera dan studio syuting. Karena keterbatasan pada hal tersebut, tim produksi harus gantian tempat maupun alat untuk melakukan produksinya setiap hari. Dalam pengadaan peralatan pendukung produksi yang telah rusak ataupun sudah semestinya diganti juga tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus menyesuaikan dana dari pemerintah juga. Solusi dalam menghadapi keterbatasan peralatan produksi, tim produksi menyiasati dengan menerapkan maksimum produksi yang dapat dilakukan setiap harinya yaitu tiga syuting program acara saja.

5. Kesimpulan

Pandemi *covid-19* membuat jumlah penggunaan internet meningkat termasuk juga pengguna media sosial *TikTok*. Penelitian ini dilakukan pada remaja Kota Manna untuk melihat motif apa yang diharapkan dan kepuasan apa yang didapatkan oleh remaja Kota Manna dalam menggunakan media sosial *TikTok* pada masa pandemi. Berdasarkan permasalahan, tujuan, hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai motif terhadap kepuasan pengguna media sosial *TikTok* pada masa pandemi, dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja Kota Manna merasa bahwa fitur *navigability* pada media sosial *TikTok* merupakan hal yang paling memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan tertinggi remaja memilih motif diharapkan dan kepuasan yang didapatkan dari penggunaan media sosial *TikTok* adalah sama terdapat pada pernyataan *play/fun*.

Sehingga dapat diartikan, motif terhadap kepuasan penggunaan media sosial *TikTok* pada remaja kota Manna berhubungan, yaitu Remaja Kota Manna merasa bahwa fitur ini paling memuaskan dari segi kenyamanan pengguna untuk menghabiskan waktu senggang dengan mengeksplor lebih dalam informasi dan hiburan menggunakan fitur-fitur di dalam media sosial *TikTok*. Hal ini dapat dilihat berdasarkan uji Korelasi *Rank Spearman*, bahwa nilai korelasi antara kedua variabel sebesar 0.764 dikatakan memiliki hubungan yang kuat dengan arah hubungan yang positif dan hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak dengan nilai signifikan probabilitas $0.000 < 0.05$.

Referensi

- Aries, A. (2017). Televisi publik lokal sebagai ruang publik dan media pembangunan partisipatif. Lontar: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2).
- Adhrianti, L. (2008). Idealisasi TVRI sebagai TV Publik: Studi "Critical Political Economy. Mediator: *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 281-292.
- Croteau, David and William Hoynes. (2001). *The Bussiness of Media: Corporate Media and The Public Interest*. Boston: Pine Forge Press.
- Effendy, R. (2014). Mengurai Potensi Ruang Publik Lembaga Penyiaran Publik dalam Upaya Demokratisasi Masyarakat Lokal. *Reformasi*, 4(2).
- _____. (2014). Memperluas Partisipasi Demokratis Masyarakat dalam Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI).
- Ghazali. (2012). *Penyiaaran Alternatif Tapi Mutlak: Sebuah Acuan tentang Penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi. Fisip UI.
- Ginting, S. S. (2015). Wajah Tayangan Prime Time Televisi Indonesia: Dimana Kepentingan Publik Di Tempatkan?. *Komunikatif*, 4(1), 18-41.
- Hadiyat, Y. D. (2016). Public Broadcasting Institutions AS Border Broadcast Media: Study At Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang (Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang). *Pekommas*, 1(1), 13-20.
- Irawan, Agusly. (2010). "Merevitalisasi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik". Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kompasiana. (2017). "Sinergi Media Penyiaran dan Media Sosial". Kompasiana.com diakses pada 5 April 2021.
- Masduki dan Darmanto. 2015. *SAVE RRI-TVRI Dokumen Inisiatif Publik untuk Transformasi Lembaga Penyiaran Publik di Indonesi*, Cet. 2. Yogyakarta: RP LPP dan Yayasan Tifa.
- McQuail, D. (2012). *Teori Komunikasi Massa* McQuail. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2008). *Manajemen Media Penyiaran (Strategi Mengelola Radio & Televisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 tahun 2005 dan UU No. 32 Tahun 2002
- Perda No.1 Tahun 2012 Pemerintah Kota Pekalongan.
- Putra, I Gusti Ngurah. (2006). TV Publik di Indonesia: Masalah Masa Lalu, Potensi dan Tantangan ke Depan. *Jurnal IPTEKKOM* Vol 8 Nomor 2.
- Undang-Undang.32 tahun 2002 merevisi Undang-Undang No.24 tahun 1997 tentang Penyiaran.
- Rianto, P., & Poerwaningtias, I. (2013). TV publik dan lokalitas budaya: Urgensinya di tengah dominasi TV swasta Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 163–176.
- Wahyudin, A., & Suparno, B. A. (2020). Strategi kebijakan penyiaran lembaga penyiaran publik lokal radio in fm kebumen dalam menjembatani kepentingan publik. *Jurnal heritage*, 8(2), 114-126.
- Wulandari, N. A. D. (2017). Lembaga Penyiaran Publik Indonesia dalam Persimpangan Idealisme Vs Ekonomi Politik Media. Interaksi: *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 78-89.
- Yantos. "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah". *Jurnal. Jurnal Risalah*. Vol. 26, No. 2, Juni 2015: 94-103.